

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi semua manusia karena pangan merupakan sumber energi untuk bertahan hidup. Ketersediaan pangan harus diperhatikan oleh suatu negara maupun masyarakat. Mendapatkan pangan yang cukup merupakan dalam hak asasi manusia. Hak asasi atas pangan telah diakui secara formal oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia (Hanani, 2012). Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi jumlah, mutu, gizi, keamanan, keragaman, pemerataan, dan keterjangkauan serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan ketersediaan pangan, distribusi pangan maupun konsumsi pangan. Menurut Hanani (2012) kebijakan pangan ditetapkan oleh pemerintah dengan tiga sub sistem utama ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*Food Availability*), akses pangan (*Food Access*), dan penyerapan pangan (*Food Utilization*).

Daerah yang termasuk dalam tahan pangan belum tentu daerah tersebut memiliki kecukupan pangan yang baik. Kondisi tidak tercapainya ketahanan pangan (*food security*) akan mengakibatkan daerah tersebut mengalami kerawanan pangan (*food insecurity*). Tingkat kerawanan pangan mempunyai korelasi positif dan erat kaitannya dengan kemiskinan (Prisharyo, 2009). Hal itu disebabkan karena rumah tangga sulit untuk mengakses kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan pangan pokok. Kemiskinan juga terdapat dalam indikator empat sub sistem dalam ketahanan pangan dan kerentanan pangan yang digunakan di Provinsi Jawa Timur (Sucipto dkk, 2012). Indikator kemiskinan tersebut termasuk dalam dimensi kelompok indikator akses pangan dan mata pencaharian. Banyak masyarakat atau rumah tangga miskin yang masih kurang mengerti tentang kecukupan pangan yang dibutuhkan baik dari segi kuantitas maupun keragaman pangan. Sehingga kondisi rawan pangan sangat rentan terjadi dalam rumah tangga miskin.

Kondisi rawan pangan yang ada di Indonesia tidak hanya terletak di pulau yang miskin dan jauh dari Ibukota saja, bahkan Provinsi Jawa Timur yang merupakan penyangga pangan nasional memiliki kabupaten dengan angka kemiskinan yang tinggi dan sangat rentan akan rawan pangan (Sucipto dkk, 2012). Banyaknya produksi pangan yang dihasilkan Provinsi Jawa Timur tidak menutup kemungkinan untuk mencukupi kebutuhan persediaan pangan. Hal itu terjadi karena luas dan banyaknya pulau yang tersebar dan juga tempat yang sulit di lewati oleh transportasi umum karena jalan yang tidak memadai. Rawan pangan sangat rentan terjadi di daerah yang terdapat di tempat terpencil dan kurangnya persediaan pangan yang cukup. Beberapa kondisi rawan pangan yang terjadi di daerah yang terkena rawan pangan dapat dialami oleh semua usia (Ariani dkk, 2007). Rawan pangan tidak mengenal umur dengan begitu sangat mudah rawan pangan masuk dalam suatu daerah yang terutama memiliki masyarakat miskin dengan presentase tinggi.

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan tinggi yakni Kabupaten Sampang dengan angka 26,97%. Banyaknya penduduk di Kabupaten Sampang 884.804 jiwa pada akhir tahun 2013 yang terdiri dari 434.784 jiwa penduduk laki-laki dan 435.195 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin 247,17 jiwa dengan presentase 26,97%. Secara umum wilayah Kabupaten Sampang merupakan daratan, terdapat suatu pulau dari daratan bernama Pulau Mandangin/Pulau Kambing (BPS, 2014). Data yang terdapat disebutkan oleh *World Food Programme* (WFP) untuk peta Kabupaten Sampang disebutkan bahwa Kabupaten Sampang mempunyai presentase tinggi terhadap rawan pangan (WFP, 2015). Menurut Sucipto dkk (2012) terdapat beberapa desa berdasarkan tingkat kerentanan pangan yang ada di Kabupaten Sampang termasuk dalam enam prioritas dengan jumlah 186 desa atau 47,85% dari jumlah total desa yang terdapat di Kabupaten Sampang dengan 14 kecamatan. Untuk mengetahui kerawanan di Kabupaten Sampang terdapat lima prioritas pengukuran. Pengukuran tersebut digambarkan bahwa prioritas I (sangat rentan), prioritas II (rentan), prioritas III (cukup rentan), prioritas IV (cukup tahan pangan), prioritas V tahan pangan, prioritas VI (sangat tahan pangan). Dalam lima prioritas yang ditentukan oleh Sucipto (2012) tersebut terdapat Kecamatan yang memiliki desa paling banyak dalam prioritas I yakni Kecamatan Kedundung. Kecamatan

Kedundung memiliki 17 desa dengan 13 desa dalam prioritas I dan prioritas sisanya empat desa terdapat di prioritas II. Dengan demikian Kecamatan Kedundung merupakan Kecamatan yang rentan akan pangan.

Banyaknya desa yang termasuk dalam kategori prioritas I di Kecamatan Kedundung membuat peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kerawanan pangan rumah tangga miskin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerawanan pangan rumah tangga miskin Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa tingkat pendapatan rumah tangga miskin di Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang?
2. Mengidentifikasi ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan rumah tangga miskin di Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga miskin di Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui tingkat kerawanan pangan rumah tangga miskin di Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, bahan pertimbangan, maupun dapat membantu dalam penetapan kebijakan terkait ketahanan pangan.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari salah satu referensi tambahan dalam penyusunan penelitian mengenai ketahanan pangan.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan akan kondisi suatu daerah terkait kerawanan pangan

